

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Mayjen HM. Ryacudu Lampung Utara

Ahmad Junaidi

Analisis Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Saburai Bandar Lampung

Eka Ubaya Taruma R.

Analisis Manajemen Mutu Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu

Hasrun Oganda

Pengaruh Pemberian Penghargaan dan Pelatihan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Teluk Betung Kota Bandar Lampung

Ridwan Rangkuti

Pengaruh Strategi Pemasaran Dan Pelayanan Terhadap Target Pasar Beton Curah CV. Arum Abadi Readymix Tarahan Lampung Selatan

Suhartina

Pengaruh Strategi Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Pada Tunas Dwipa Matra Cabang Trimurjo)

Yoga Aditya Anggana P.

Partisipasi Publik Dalam Program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus

Yuli Tusiono



e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 3 No. 2 Agustus 2017

Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik, M.Si

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Refly Setiawan, S.A.P., M.Si

Vida Yunia Cancer, S.A.N

Tata Usaha

Winda, SE

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 3 No. 2 AGUSTUS 2017

DAFTAR ISI

Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Mayjen HM. Ryacudu Lampung Utara	1-9
Ahmad Junaidi	
Analisis Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Saburai Bandar Lampung	10-21
Eka Ubaya Taruma Rauf	
Analisis Manajemen Mutu Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu	22-34
Hasrun Oganda	
Pengaruh Pemberian Penghargaan dan Pelatihan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Teluk Betung Kota Bandar Lampung	35-44
Ridwan Rangkuti	
Pengaruh Strategi Pemasaran Dan Pelayanan Terhadap Target Pasar Beton Curah CV. Arum Abadi <i>Readymix</i> Tarahan Lampung Selatan	45-54
Suhartina	
Pengaruh Strategi Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Pada Tunas Dwipa Matra Cabang Trimurjo)	55-63
Yoga Aditya Anggana Putra	
Partisipasi Publik Dalam Program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus	64-76
Yuli Tusiono	

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROGRAM BANTUAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN
TANGKIT SERDANG KECAMATAN PUGUNG
KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh:

**YULI TUSIONO, MAHASISWA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ABSTRACT

In this journal, the author will analyze the facts that really happened that public participation in the aid program Family Hope Program (PKH) in Sub Tangkit Serdang. The purpose of research which will be discussed in this thesis is to want to know, analyze and explain the public participation in the aid program PKH. This thesis have purpose to know, analyze and explain the factors that influence public participation in the aid program PKH.

The method used to belong to the descriptive using qualitative analysis. Sources of data captured in the study is the Receiving Communities Program, Head of Tangkit Serdang, Community Leaders and Assistants PKH.

Based on data analysis has been carried out, participation in the Village Tangkit Serdang has been pretty good in the aid program PKH. Constraints affecting public participation can be resolved by involving the community, Head, Companion PKH and related parties.

Keywords: Public Participation, PKH

A. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, Negara Republik Indonesia telah menjatuhkan pilihannya pada asas desentralisasi. Dalam pelaksanaan sejumlah program pembangunan pedesaan dengan beberapa penyebab kegagalannya mengundang pertanyaan mendasar tentang apa sesungguhnya pembangunan pedesaan itu, pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, akan partisipasi masyarakat desa untuk terlibat secara penuh dan mendapatkan manfaat sehingga pelaksanaan berbagai program pembangunan pedesaan telah efektif mengubah taraf kesejahteraan masyarakat desa. Partisipasi publik memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran

maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Dalam konsep *Governance* terdapat tiga kaki utama (*three legs*) dan tiga domain utama (*three domains*). Ketiga kaki utama yang dimaksud adalah *political governance*, *economic governance* dan *administrative governance*. Sedangkan tiga domain utama yang dimaksud adalah mencakup unsur negara (*state*), swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*) (Wiyoto dan Mindarti, 2005:208). *Good Governance* pada dasarnya berkaitan dengan upaya perbaikan kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan hubungan yang harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan negara (*state*), swasta (*private or market*) dan masyarakat sipil (*civil society*), yang didukung dengan adanya penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan aneka

sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan (Wiyoto dan Mindarti, 2005:209). Sebagai salah satu unsur *good governance*, masyarakat memiliki andil bagi pembangunan melalui partisipasi publik dalam program pembangunan.

Selama ini partisipasi di Indonesia mengalami beberapa permasalahan didalamnya, adapun beberapa permasalahan yang dihadapi partisipasi publik menurut Soetrisno (Melinda 2009:2) antara lain :

1. Partisipasi yang saat ini berlaku di kalangan lingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.
2. Di kalangan masyarakat munculnya budaya diam, yakni keengganan masyarakat untuk mengevaluasi hasil pembangunan secara kritis dan terbuka.

Kondisi yang dipaparkan di atas sangat patut disayangkan, padahal partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dinilai sebagai strategi efektif dalam meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Berbagai hal tersebut disebabkan dengan adanya partisipasi publik maka pembangunan dapat menjangkau masyarakat terlemah melalui upaya membangkitkan semangat hidup untuk mendorong diri sendiri. Selain itu, pentingnya partisipasi masyarakat karena pemerintah daerah sebagai organisasi bersistem terbuka membutuhkan tenaga dari luar untuk menopang kelangsungannya, dan partisipasi publik dapat dimanfaatkan sebagai sumber alternatif daerah untuk menggantikan sumber energi pemerintah pusat (Kagungan, 2004 : 44).

Terkait dengan arti pentingnya partisipasi publik tersebut, dalam hal ini Pemerintah memberikan program bantuan melalui

Program Keluarga Harapan (PKH) yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu dari program penanggulangan kemiskinan dan telah menjadi Program Nasional. Karenanya dalam pelaksanaan di lapangan bukan sekedar bagaimana program ini berjalan, akan tetapi bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan secara implisit langsung bisa dirasakan bagi para penerima program dan ada variabel yang terukur seperti mulai tumbuhnya kemandirian sebagai hasil pendampingan dan pembinaan oleh pendamping PKH.

Dari latar belakang tersebut yang menjadi acuan peneliti untuk meneliti apakah kegunaan uang bantuan tepat pada sasaran untuk pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Berbagai kendala yang dihadapi oleh PKH merupakan sebuah persoalan yang cukup berdampak bagi kualitas pendidikan dan kesehatan anak KSM. Masih menurut sumber yang sama, dalam penyelenggaraan program PKH minimnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak dalam program bantuan PKH menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi.

B. Kajian Pustaka

Pengertian Partisipasi Publik

Masih menurut Oakley (1991:9) didalam partisipasi terdapat berbagai bentuk-bentuk dalam menentukan partisipasi yaitu :

1. Partisipasi sebagai suatu bentuk kontribusi; berupa keterlibatan dan kontribusi lainnya masyarakat secara sukarela terhadap program pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa iuran dana, sumbangan pemikiran, benda/ tempat, dan juga tenaga.

2. Partisipasi sebagai elemen dalam organisasi; merupakan sarana bagi masyarakat untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa tingkat kepercayaan / mandat, kontak langsung dengan pihak lain, dan sebagai sarana informasi serta tanggung jawab pelaksanaan program.
3. Partisipasi sebagai elemen dalam pemberdayaan; yaitu upaya mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat guna memutuskan keterlibatan dalam pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa kemauan dan kemampuan serta pengembangan keterampilan.

Hambatan yang terdapat dalam Partisipasi Publik

Ungkapan partisipasi publik tidak semudah dalam pelaksanaannya. Menurut Oakley (1991:8), pelaksanaan partisipasi sering terkendala oleh hambatan struktural, hambatan administratif, dan hambatan sosial. Hambatan struktural dapat berbentuk situasi politik negara seperti; masalah ideologi yang tertutup, sistem politik yang terpusat bukan desentralistik, tekanan diantara kebijakan yang diputuskan pusat dan daerah, tekanan dari suatu kebijakan, ekonomi, dan politik serta sistem hukum yang banyak aturan. Semuanya itu sering menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pengentasan kemiskinan.

Hambatan administratif terkait dengan sistem pemerintahan yang sentralistik, maka sistem administrasinya pun terpusat. Akibatnya pengendalian pengambilan keputusan, alokasi sumber dan informasi serta pengetahuan terpusat, mencegah terjadinya keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam melakukan asistensi administrasi. Termasuk pula perencanaan terpusat dapat melemahkan partisipasi masyarakat dalam proses pengentasan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Pada tahun 2007, pemerintah meluncurkan suatu program yang bernama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, terutama negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi, contohnya Meksiko dan Brazil. Meksiko merupakan negara pertama di Amerika Latin yang memperkenalkan program bantuan tunai bersyarat dengan nama Progresa pada tahun 1997, untuk setiap keluarga dan diberikan berdasarkan syarat pada kehadiran anak-anak di sekolah dan *check up* kesehatan seluruh anggota rumah tangga penerima manfaat, pada tahun 2002 setelah mengalami perluasan jangkauan maka berganti nama menjadi *Oportunidades*.

Program ini pada prinsipnya memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin melalui persyaratan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu menyekolahkan anak usia wajib belajar, pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil dan balita, serta memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya. Bantuan tunai ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin untuk jangka pendek dengan sasaran keluarga sangat miskin yang mempunyai anak usia 0-18 tahun dan ada wanita usia subur yang sedang hamil.

Dalam jangka panjang, PKH mempunyai tujuan pembangunan kapabilitas dasar manusia sehingga terjadi pemotongan pewarisan kemiskinan antar generasi. Dalam kerangka tersebut program ini juga dirancang untuk mempercepat penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan mengurangi kasus pekerja anak dan mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)

Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial (2002), kemiskinan

merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan yaitu sejumlah rupiah yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Dalam buku Suharto, Edi dkk., (2004). SMERU membagi kemiskinan memiliki berbagai dimensi, yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air bersih, dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan untuk masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual dan massal.
5. Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya sumber alam.
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpendil).

Keluarga Sangat Miskin (KSM)

Keluarga sangat miskin memiliki beberapa kriteria umum yang digunakan oleh BPS untuk menjadi persyaratan program PKH. Berikut 14 kriteria miskin

menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal dari tanah / bambu / kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-perbulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD / tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dalam menentukan rumah tangga miskin yang ada di Indonesia, BPS berpatokan pada 14 kriteria yang telah ditentukan pusat. Penentuan kriteria miskin itu dilakukan melalui Susenas yang dilakukan BPS sendiri. Golongan rumah tangga sangat miskin adalah yang

memenuhi ke 14 kriteria diatas, yang hanya memenuhi antara 11 sampai 13 kriteria disebut rumah tangga miskin. Sementara yang memenuhi 9 sampai 10 kriteria adalah disebut rumah tangga mendekati miskin dan apabila hanya memenuhi kurang dari 8 kriteria tidak termasuk rumah tangga miskin. Untuk KSM Kelurahan Tangkit Serdang, kriteria kemiskinan yang digunakan teori ini sudah cocok diterapkan dilihat dari kriteria fisik rumah dan aksesnya di daerah tersebut sebagai dasar awal untuk menjadi calon peserta PKH.

Pendidikan

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. John Dewey mewakili aliran filsafat pendidikan modern merumuskan *Education is all one growing; it has no end beyond it self*, pendidikan adalah segala sesuatu bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir di balik dirinya.

Paulo Freire mengatakan, pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa dimana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, dimana melalui praktis mengubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun atas tahap yang pertama, dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan. H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental,

yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

Frederick J. Mc Donald, pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat. M.J. Longeveled, Pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Darmaningtyas mengatakan tentang definisi pendidikan yaitu pendidikan sebagai usaha dasar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang ledih baik.

Dalam proses pertumbuhan ini anak mengembangkan diri ke tingkat yang semakin sempurna atau *life long education*, dalam artian pendidikan berlangsung selama hidup. Pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dunia peradaban, juga merupakan bimbingan eksistensial manusia dan bimbingan otentik, supaya anak mengenali jati dirinya yang unik, mampu bertahan, memiliki dan melanjutkan atau mengembangkan warisan sosial generasi terdahulu, untuk kemudian dibangun lewat akal budi dan pengalaman (Kartono,1997).

Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan,

pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain.

C. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Model Penelitian Kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari-dasar, bersifat deskriptif, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian (Moleong, 2013:44).

Jenis penelitian yang digugulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, serta menelaah literatur, arsip, artikel, dokumen, dan bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi data. Triangulasi digunakan meliputi 4 (empat) hal pokok yakni : 1). triangulasi data, yang digunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga

dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang di anggap memiliki sudut pandang yang berbeda . 2). triangulasi peneliti, Yaitu adanya pengamat di luar peneliti yang turut memberikan hasil pengumpulan data dalam penelitian ini, promotor peneliti juga termasuk sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan dan koreksi terhadap hasil pengumpulan data. 3). triangulasi teori, yaitu penggunaan *multiple theory* (lebih dari satu teori utama) atau beberapa prespektif untuk menginterpretasi sejumlah data. dalam penelitian ini teori utama memungkinkan di tambah dengan teori-teori yang lain yang berkembang selama penelitian berlangsung. 4). triangulasi metodologi, Yaitu penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara yang di tunjang dengan metode observasi pada saat wawancara di lakukan dan metode dokumentasi.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Kelurahan Tangkit Serdang

Kelurahan Tangkit Serdang merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Pugung adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan gerbang utama memasuki wilayah Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pugung terletak di bawah kaki Gunung Tanggamus dan merupakan salah satu Kecamatan besar dan terpadat penduduknya disalah satu kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dalam istilah internasionalnya dikenal dengan *Conditional Cash Transfer (CCT)*. PKH membantu Keluarga Sangat Miskin untuk memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan pendidikan dasar.

PKH diarahkan untuk membantu Keluarga Sangat Miskin (KSM) dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta memberikan kemampuan keluarga untuk meningkatkan konsumsi. Secara khusus tujuan dari program bantuan PKH, yaitu :

1. Meningkatkan konsumsi keluarga penerima bantuan PKH.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga penerima bantuan PKH.
3. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH.
4. Mengarahkan perubahan perilaku positif keluarga penerima bantuan PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan dan pelayanan kesejahteraan sosial.
5. Memastikan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial.

Adapun syarat untuk menentukan peserta PKH, Keluarga Sangat Miskin (KSM) harus memenuhi satu atau beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Ibu Hamil / Nifas
2. Anak usia dibawah lima tahun
3. Anak usia Pra-Sekolah
4. Anak SD dan sederajat
5. Anak SMP dan sederajat
6. Anak SMA dan sederajat, dan
7. Anak Disabilitas

Partisipasi Publik dalam Program Bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang

Partisipasi Sebagai Bentuk Kontribusi Masyarakat

Masyarakat dinilai sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan program dan memberikan kontribusi yang cukup besar. Peran

pendamping dalam program bantuan PKH yaitu sebagai mediator, fasilitator, pendidik, sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat sebagai peserta PKH bisa berdaya untuk membangun hidup mereka dan keluar dari kemiskinan hidup secara mandiri. Masyarakat dinilai memiliki kontribusi yang cukup baik, baik berupa tenaga maupun bantuan dana swadaya yang sangat membantu terlaksananya program tersebut sehingga berbagai kendala yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Program bantuan PKH dinilai memberikan ruang kepada masyarakat penerima bantuan untuk turut berkontribusi secara aktif dan sebagai wadah yang baik untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat disekitar Kelurahan Tangkit Serdang. Masyarakat juga dinilai sebagai agen yang dapat memberikan masukan demi kebaikan dan perubahan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan demikian masyarakat tidak terbebani dengan adanya pembayaran uang sekolah. Sehingga dapat membantu masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan terutama untuk anak sekolah. Seperti diketahui, bahwa warga Kelurahan Tangkit Serdang tersebut banyak yang bermata pencarian sebagai petani dan buruh mereka bertempat tinggal sangat dekat dengan area pertanian dan persawahan. Dalam penyelenggaraan program bantuan PKH, sebagian masyarakat sekitar ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif, sehingga segala kebutuhan dan kekurangan dalam penyelenggaraan program bantuan PKH tersebut dapat diatasi secara bersama oleh pihak penyelenggara program hingga sebagian besar lapisan masyarakat.

Skema Bantuan, Indeks dan Komponen Bantuan Tahun 2015

Skema Bantuan	Indeks Bantuan Per-KSM / Tahun
Bantuan Tetap	Rp. 500.000
Bantuan bagi Peserta PKH dengan komponen : a. Ibu Hamil/Menyusui/Nifas/Anak Usia dibawah 6 Tahun	Rp. 1.200.000

b. Anak SD dan yang sederajat	Rp. 450.000
c. Anak SMP dan yang sederajat	Rp. 750.000
d. Anak SMA dan yang sederajat	Rp. 1.000.000
Bantuan minimum per-KSM	Rp. 1.000.000
Bantuan maksimum per-KSM	Rp. 3.900.000

Sumber : Buku Panduan PKH Tahun 2015

Partisipasi Sebagai Elemen dalam Organisasi

Dari pembahasan mengenai partisipasi publik dalam program bantuan PKH dengan menggunakan teori ini maka akan terlihat sejauhmana program bantuan PKH sebagai suatu organisasi yang melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam hal ini, program PKH dinilai sebagai suatu wadah bagi masyarakat untuk ikut secara aktif maupun pasif dan melibatkan diri dalam pembangunan demi memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dan dapat disimpulkan bahwa melalui partisipasi publik masyarakat di Kelurahan Tangkit Serdang membantu program PKH dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi dapat dinilai sebagai elemen dalam organisasi karena masyarakat dapat ikut berperan didalam suatu wadah, yaitu program bantuan PKH dalam memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Dalam program tersebut semua masyarakat penerima bantuan terlibat dalam penyelenggaraan program dan ikut berperan dalam pelaksanaan program tersebut.

Partisipasi Sebagai Elemen dalam Pemberdayaan

Dalam hal ini, penulis akan menilai partisipasi masyarakat dalam program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang yang dilihat dari teori partisipasi sebagai elemen dalam pemberdayaan. Partisipasi sebagai elemen dalam pemberdayaan merupakan upaya mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat didalam

pembangunan. Dengan kata lain pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menggali potensi atau kemampuan masyarakat untuk menunjang keberhasilan suatu program.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat dikelurahan Tangkit Serdang dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam program bantuan PKH khususnya melalui pokja sosial. Hal ini karena, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam program PKH tidak hanya melalui sumbangan tenaga atau pemikiran tetapi juga dapat melalui keahlian yang dimiliki.

Melalui partisipasi masyarakat terhadap program bantuan tersebut dapat mempermudah pokja sosial dalam memberdayakan masyarakat sekitar melalui program yang telah ditetapkan salah satunya melalui pelatihan keterampilan untuk menunjang potensi kemampuan masyarakat dilingkungan kecamatan Pugung khususnya di Kelurahan Tangkit Serdang.

Masyarakat yang belum berpartisipasi secara aktif dalam elemen pemberdayaan ini maka masyarakat penerima program tidak dapat belajar mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh keuntungan untuk masyarakat itu sendiri. Dan dapat diambil kesimpulan mengenai partisipasi publik dalam program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang terlihat jelas bahwa program PKH dapat memberikan kesan positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tangkit Serdang.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini dinilai sebagai alat pendukung pencapaian suatu rencana program. Selain itu, partisipasi dinilai sebagai suatu pemberdayaan karena didalam program

tersebut dapat memberdayakan masyarakat sekitar dalam hal yang positif dan menunjang keahlian yang mereka miliki.

Rekapitulasi Hasil Pemikiran Subjek Penelitian dan Informan Mengenai Partisipasi Masyarakat Kelurahan Tangkit Serdang pada Program Bantuan PKH

Elemen Partisipasi Publik	Pemikiran Subjek dan Informan Penelitian			Konklusi
	Koordinator Kecamatan PKH	Pendamping Program Bantuan PKH	Masyarakat	
Kontribusi masyarakat	Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup
Organisasi	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik
Pemberdayaan	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Hasil Penelitian Wawancara pada Program Bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang Tahun 2016

Dari tabel rekapitulasi di atas, dapat terlihat secara keseluruhan mengenai partisipasi publik dalam program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik sebagai kontribusi masyarakat dalam program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang dinilai cukup baik. Hal tersebut dikarenakan hanya sebagian besar masyarakat yang berpartisipasi secara aktif.

Sedangkan masih terdapat sebagian masyarakat yang belum ikut berpartisipasi secara aktif didalam program tersebut dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait yang dapat memberikan batasan-batasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Selain itu, sikap dari diri individu itu sendiri serta cara pandang sebagian masyarakat yang menganggap bahwa program tersebut merupakan program milik pemerintah yang dianggap mereka tidak diharuskannya campur tangan dari masyarakat sehingga dalam hal tersebut dapat dikategorikan cukup baik.

Mengenai partisipasi publik sebagai elemen dalam organisasi didalam program bantuan PKH dinilai baik. Hal

tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat memberikan pandangan yang baik bahwa program bantuan PKH telah menjadi suatu wadah bagi mereka untuk ikut berpartisipasi dan menampung aspirasi kebutuhan yang mereka inginkan. Selain itu juga, program bantuan PKH dianggap telah memberikan suatu terobosan dalam hal pembangunan dan melalui program bantuan PKH ini, tidak hanya kebutuhan ekonomi tetapi kebutuhan sosial juga dapat terpenuhi dengan baik.

Sedangkan partisipasi publik sebagai elemen dalam pemberdayaan didalam program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang dianggap baik karena dianggap sebagai suatu transformasi yang baik bagi sebagian besar masyarakat dan dapat mengembangkan keahlian atau keterampilan mereka serta dapat mengimplementasikannya didalam kehidupan sehari-hari.

Hambatan yang Mempengaruhi Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Program Bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang

Adapun hambatan yang mempengaruhi partisipasi publik dalam

pelaksanaan program bantuan PKH berdasarkan teori Oakley, dapat terlihat ada tiga penilaian dasar yang menyebabkan kurang efektifnya program bantuan PKH tersebut yaitu antara lain sebagai berikut:

Hambatan Struktural

Dalam penyelenggaraan suatu program tidak terlepas dari suatu hambatan yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program tersebut. Hambatan struktural dinilai sebagai suatu bentuk situasi politik negara, tekanan dari suatu kebijakan, ekonomi, dan politik serta sistem hukum yang banyak aturan dapat menjadikan suatu hambatan struktural tetap ada ditengah-tengah masyarakat dan mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, yang akan menjadi sasaran ketidakadilan menurut masyarakat adalah lurah dan pendamping yang menjabat periode selanjutnya. Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat disekitar Kelurahan Tangkit Serdang mengenai mekanisme penyelenggaraan PKH. Hal ini menurutnya terkesan tidak terbuka dan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program bantuan PKH. Sehingga sebagian masyarakat sulit untuk berpartisipasi dan terlibat didalam program tersebut.

Dari keterangan tersebut, dapat terlihat bahwa salah satu hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program bantuan PKH yaitu ketidakterbukaan pihak kelurahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut lebih terlihat bahwa kebijakan yang diputuskan cenderung diambil oleh sebelah pihak, sehingga masyarakat cenderung berpikir bahwa program tersebut milik pemerintah dan oleh pemerintah setempat.

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu saja yang mengetahui alur

program bantuan PKH tersebut. Hal ini terkesan bahwa masyarakat dikendalikan oleh kebijakan yang telah diatur oleh pihak kelurahan sebagai mitra program bantuan PKH.

Hambatan Administratif

Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program bantuan PKH yang ditinjau melalui hambatan administratif terhadap masyarakat. Hambatan administratif ditinjau berdasarkan sistem administrasi yang terpusat, sehingga dapat melemahkan partisipasi masyarakat dalam program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam program bantuan PKH masih terdapat beberapa masyarakat yang semata-mata hanya mencari keuntungan untuk dirinya secara pribadi. Dengan adanya pemotongan dana yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut seharusnya masyarakat sadar akan kesalahan yang dilakukan dan lebih meningkatkan partisipasinya dalam program bantuan PKH. Selain itu, masyarakat seharusnya bisa merubah pola pikir meraka bahwasanya program bantuan tersebut diperuntukan untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta kebutuhan pokok.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak Pendamping PKH dan pihak yang terkait telah bekerja secara optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, didalam pelaksanaan tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar dikarenakan dengan alasan sarana dan prasarana yang belum memadai, jauhnya tempat tinggal KSM menuju fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sehingga menjadi suatu hambatan yang dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu

tindakan yang nyata dalam mengatasi hal tersebut.

Hambatan Sosial

Dalam partisipasi publik pada pelaksanaan program bantuan PKH, hambatan sosial merupakan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat yang dapat berupa kesenjangan sosial, hingga nilai dan caraukan pandang yang berbeda-beda. Dalam menentukan data pemerintah yang menentukan masyarakat penerima program yang digunakan oleh pemerintah masih menggunakan data PPLS tahun 2011 sehingga masyarakat penerima bantuan PKH kurang tepat sasaran. Selain itu, masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam program bantuan PKH tersebut dikarenakan sikap dari diri individunya itu sendiri.

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan sosial seperti kesenjangan sosial didalam masyarakat hingga sikap dari diri individu itu sendiri dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan PKH. Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program bantuan PKH sebagian masyarakat menilai bahwa PKH merupakan program bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat sehingga mereka menganggap bahwa panitia pelaksana program merupakan aktor utama dalam kegiatan tersebut tanpa harus melibatkan masyarakat disekitarnya. Hal tersebut dikarenakan setiap masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam menyikapinya.

Langkah-langkah yang Dilakukan oleh Pihak PKH dalam Menghadapi Hambatan yang Mempengaruhi Partisipasi Publik dalam Program Bantuan PKH

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang mempengaruhi partisipasi publik dalam program bantuan PKH pihak

panitia penyelenggara program PKH melakukan suatu pendekatan kepada masyarakat. Seperti diketahui bahwa, setiap masyarakat memiliki cara pandang dan sifat yang berbeda-beda.

1. Melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat penerima bantuan untuk berpartisipasi dalam program bantuan PKH.
2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajibannya dibidang kesehatan seperti tidak memeriksakan kehamilan dan balitanya maupun bidang pendidikan seperti tingkat kehadiran kurang dari 85% disekolah.
3. Menanamkan sikap kepedulian kepada masyarakat sekitar untuk dapat peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar.
4. Memberikan motivasi dan membangun komitmen peserta PKH dalam pelaksanaan program.
5. Melakukan pendampingan dan pengelolaan SDM kepada masyarakat penerima bantuan dengan memberikan arahan dan sosialisasi mengenai program.
6. Menjalin kerjasama yang erat dan hubungan kekeluargaan kepada masyarakat penerima bantuan maupun organisasi-organisasi yang terdapat dilingkungan Kelurahan Tangkit Serdang, sehingga dapat menumbuhkan hubungan yang baik.

E. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi publik dalam program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mengenai partisipasi masyarakat terhadap program bantuan PKH sudah terbilang cukup baik, hal ini dikarenakan masih terdapat sebagian masyarakat yang belum dikategorikan

berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang beranggapan bahwa program tersebut merupakan program pemerintah yang tidak diharuskan campur tangan dari masyarakat.

2. Dalam penyelenggaraan program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang tersebut terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, adapun hambatan yang dihadapi yaitu:

- a) Hambatan Struktural

Salah satu hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program bantuan PKH yaitu ketidakterbukaan pihak kelurahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut lebih terlihat bahwa kebijakan yang diputuskan cenderung diambil oleh sebelah pihak, sehingga masyarakat cenderung berpikir bahwa program tersebut milik pemerintah dan oleh pemerintah setempat.

- b) Hambatan Administratif

Kendala yang dihadapi pendamping dalam program bantuan PKH ada beberapa peserta PKH yang sulit dalam pengumpulan berkas data. Adapun kendala yang lain yang dihadapi pendamping adalah dana bantuan yang diberikan kepada peserta PKH tidak digunakan dengan semestinya dan masih terdapat beberapa masyarakat yang semata-mata hanya mencari keuntungan untuk dirinya secara pribadi.

- c) Hambatan Sosial

Terdapat kesenjangan sosial didalam masyarakat yaitu antara masyarakat yang mampu dan masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat menimbulkan suatu kesalahpahaman didalamnya,

dikarenakan sebagian masyarakat yang memperoleh bantuan PKH adalah masyarakat yang cukup mampu. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan PKH.

Saran

Setelah melalui penelitian mendalam tentang partisipasi publik dalam program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang, maka peneliti dapat memberikan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Untuk mendorong tingkat keberhasilan dalam program PKH, sebaiknya masyarakat lebih aktif dan peduli terhadap program tersebut. Selain itu, diharapkan kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif.

2. Untuk tercapainya keberhasilan program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang, pendamping PKH dan pihak-pihak yang terkait dapat mengatasi masalah dan memberikan solusi kepada masyarakat penerima program bantuan PKH. Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- a) Hambatan Struktural

Dalam penyelenggaraan program bantuan PKH, peran dari pihak kelurahan dan pihak yang terkait sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan program PKH maupun yang belum mendapatkan bantuan PKH. Sehingga masyarakat tidak salah paham tentang program bantuan PKH dan dapat mengerti sasaran dari program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang.

- b) Hambatan Administratif

Untuk tercapainya tujuan dari program bantuan PKH di Kelurahan Tangkit Serdang peran pendamping sebagai tolak ukur

dari keberhasilan program. Maka dari itu pendamping wajib dalam pendampingan dan memberikan arahan-arahan, bimbingan kepada masyarakat penerima program, memonitoring, melakukan pertemuan dan pengawasan, serta memoyivasi dan membangun komitmen kepada masyarakat penerima bantuan PKH. Sehingga masyarakat penerima bantuan tidak menanggapi bahwa program bantuan PKH hanya untuk pengambilan uang saja, melainkan harus memenuhi kewajiban sebagai keanggotaan dari PKH.

- c) Hambatan Sosial
Dalam mengatasi kesenjangan sosial dalam program bantuan PKH, peran dari pendamping, pihak kelurahan maupun pihak yang terkait sebaiknya memberikan arahan serta sosialisasi pada saat validasi awal kepada masyarakat, bahwasanya program bantuan PKH, untuk yang mendapatkan undangan dan sebagai keanggotaan PKH telah ditetapkan atau data yang digunakan yaitu pendataan pada

tahun 2011. Sehingga sebagian besar yang memperoleh manfaat program bantuan PKH adalah masyarakat yang sudah tercatat pada tahun 2011. Dan pemerintah atau penyelenggara program bantuan PKH belum mengeluarkan data terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002), *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002* Jakarta I BPS.
- Moleong. L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Remiswal. (2013). *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Panduan umum PKH/
http://www.kemensos_Ri.org
- Program Keluarga Harapan.
www.pkh.depsos.go.id

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 3 No. 2 Agustus 2017

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

